

PROSIDING

KONFERENSI NASIONAL KE- 6

ASOSIASI PROGRAM PASCASARJANA
PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH 'AISYIYAH
(APPPTMA)

JILID 1I: SOSIAL DAN POLITIK, PEMIKIRAN ISLAM,
HUKUM, KESEHATAN

Universitas Muhammadiyah Parepare dan
STISIP Muhammadiyah Rappang
8-9 September 2017



ASOSIASI PROGRAM PASCASARJANA
Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah



Penerbit

Program Pascasarjana

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Prosiding
KONFERENSI NASIONAL KE-6
ASOSIASI PROGRAM PASCASARJANA
PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH 'AISYIYAH (APPPTMA)

Jilid 2, vi + 253 halaman, 170 x 250 mm

ISBN: 978-602-50710-1-0

Editor:

Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc.

Dr. Sudarno Shobron

Dr. M. Nurul Yamin

Priyatmoko Nugroho, S.E., M.Eng.

Penerbit:

Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Cetakan Pertama, Oktober 2017

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

Kata Pengantar

Prosiding ini merupakan hasil penelitian dari mahasiswa dan dosen program pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah se-Indonesia yang dipresentasikan di Universitas Muhammadiyah Parepare dan STISIP Muhammadiyah Rappang, Sulawesi Selatan pada tanggal 8-9 September 2017. Total Paper berjumlah 109 dan paper terpublikasi dalam prosiding berjumlah 86. Paper hasil penelitian mahasiswa dan dosen terbagi menjadi beberapa kategori bidang ilmu: pendidikan, pemikiran Islam, sosial dan politik, hukum, ekonomi, kesehatan, teknologi, psikologi serta pertanian, peternakan dan perikanan.

Dengan terbitnya prosiding ini diharapkan dapat menjadi cermin dari tahapan penting dari penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Asosiasi Pengelola Program Pascasarjana mengucapkan terimakasih kepada semua pihak, terutama editor yang telah meluangkan waktunya untuk mereview dan mengedit prosiding sehingga dapat ditampilkan dalam bentuk prosiding baik *hard book* maupun *e-book*. Harapan kami, sebagai pengelola pascasarjana dapat secara terus menerus meningkatkan suasana dan kualitas akademik program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah se-Indonesia.

Sebagai sebuah produk hasil penelitian, kami mengharapkan prosiding ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti sejenis baik di dalam negeri maupun di luar negeri dalam bentuk jumlah sitasi yang meningkat. Dengan semakin meningkatnya jumlah sitasi, maka semakin penting penelitian tersebut.

Segala kekurangan dapat disampaikan kepada kami.

Yogyakarta, 15 September 2017

Prof. Dr. Khuzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum

Ketua Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah se-Indonesia

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv

Jilid 2 Sosial dan Politik, Pemikiran Islam, Hukum, Kesehatan

Nilai Sosial Budaya Pada Partisipasi Masyarakat Etnik Towani Tolotang Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan

Ahmad Mustanir, M. Rais Rahmat Razak - 1

Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng

Baharuddin Andang - 8

Join Visioning Dalam Implementasi Kebijakan (Studi kasus Program Pengembangan Pohon Jarak Pagar di Kabupaten Jeneponto)

Muliani S. - 22

Evaluasi Program Pembangunan Gerakan Nasional Kakao Kabupaten Luwu di Sulawesi Selatan

Nurjannah Nonci - 35

Komodifikasi Agama Di Ruang Publik: Studi terhadap Penggunaan Simbol Agama Pilkada 2015 di Kabupaten Kebumen Jawa Tengah

Hasse J., Mega Hidayati - 49

Pengaruh Kepemimpinan Uwa Terhadap Perilaku Pemilih Masyarakat Towani Tolotang Dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2014 di Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang

Andi Astinah Adnan - 66

Pengembangan Kerukunan dan toleransi Antar Umat Beragama: Implementasi Sistem *Panngaderreng* di Kota Parepare

Abdul Halik, Djamaluddin M. Idris, Surendah Hamid 73

Mendialogkan *Muhkam Mutasyabih* dan Aspek Pendidikannya Perspektif Manna' Khalil Al-Qattan

Muthoifin - 86

Pendidikan Islam Dan Neurosains
Suyadi - 93

Transplantasi Nilai Moral dalam Budaya untuk Menuju Hukum Berkeadilan
(Perspektif Hukum Sistematis Ke Non-Sistematis Charles Sampford)
Absori, Achmadi - 108

Pendidikan Hukum Yang Bervisi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
Arief Budiono, Siti Syahida Nurani, Ucuk Agiyanto - 118

Integrasi Proses Sosiologis Yuridis Dalam Masyarakat Sebagai Alternatif Penyelesaian Proses Pidana (Korelasi Antara Hukum Adat, *Positivistik* Dan *Common Law*)
Aries Isnandar, Sugeng Wibowo, Emma Ellyani - 129

Kiprah Densus 88 Dalam Penanganan Teroris Di Indonesia
Firmansyah, Asram AT Jadda - 144

Paradigma *Centralized System Of Policing*: Kajian Polisi Berkarakter Humanis Di Era Globalisasi
Sri Waljinah - 156

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Dalam Pengelolaan Sampah Berdasar *Polluter Pays Principle*
Yeni Widowaty - 171

Hubungan Persalinan *Caesarean Section* Dengan Kejadian *Ikterus* Pada *Neonatus* Di RSUD Muhammadiyah Bantul
Aliyyah, Dhesi Ari Astuti - 184

Kemauan Mahasiswa Membayar Layanan Berhenti Merokok Di Klinik Kampus
Arlina Dewi - 190

Pengaruh Penggunaan Media Belajar terhadap Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Anak Binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Parepare
Ayu Dwi Putri Rusman, Herlina Muin - 196

Pengaruh Adab Tidur Menurut Sunah Rasul terhadap Insomnia pada Lansia di Dukuh Ngebel, Bantul Yogyakarta

Iin Rahmayanti Soamole, Erfin Firmawati - 205

Pemberian ASI Eksklusif dengan Pendekatan Model *Theory Planned Behavior* (TPB)

Mufdlilah, A.A Subijanto, Muhammad Ahyar, Endang Sutisna - 214

Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Studi Kasus: Pasien Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassar Kota Parepare

Pratiwi Ramlan - 220

Persepsi Mahasiswa Keperawatan Tentang Peran Perawat Di Indonesia

Fitri Arofiati, Indri Lestari - 231

Karakteristik Masyarakat Miskin Terhadap Pengaruh Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Massenrengpulu Kabupaten Enrekang

Henni Kumaladewi H., Makhrajani Majid, Herlina Muin - 238

Penerapan Metode Fast Terhadap Pengembangan SIM-RS Untuk Peningkatan Pelayanan Di RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang

Putri Nur Rahma, Makhrajani Madjid, Herlina Muin - 248

Komodifikasi Agama Di Ruang Publik: Studi terhadap Penggunaan Simbol Agama Pilkada 2015 di Kabupaten Kebumen Jawa Tengah

Hasse J.¹, Mega Hidayati²

^{1,2}Program Doktor Politik Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

¹hasse@umy.ac.id, ²mega.hidayati@umy.ac.id

"the dilemma for muslims is that they always want to play politics, but they are always in a position to be co-opted" (R.J Vatikiotis, Michael, 1994:120).

Abstrak-Penggunaan simbol-simbol agama dalam kampanye masih menjadi bagian dari proses demokratisasi di Indonesia. Ini merupakan salah satu cara yang digunakan oleh partai politik untuk meraih simpati masyarakat. Realitas masyarakat yang beragama (Islam) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kebumen, Jawa Tengah pada tahun 2015 menjadi fakta atas pelanggaran upaya ini. Berbagai atribut agama diperkenalkan dan dikonstruksikan sebagai bagian dari diri dan program kerja calon pemimpin yang akan dipilih.

Melalui observasi dan analisis deskriptif kritis terhadap realitas tersebut, ditemui bahwa di pilkada Kebumen 2015, agama terbukti menjadi alat yang ampuh dalam mendulang suara meskipun bagi kalangan tertentu, penggunaan simbol agama dalam pilkada dianggap tidak pada tempatnya. Fenomena ini memberikan pemahaman mengapa pada daerah-daerah tertentu di Indonesia, organisasi keagamaan pun dipaksa masuk dalam politik praktis melalui para elit organisasi tersebut. Pada akhirnya, agama akan selalu menjadi salah satu alat untuk mendulang suara dalam pemilihan di Indonesia.

Kata Kunci: Pilkada, Simbol Agama, komodifikasi agama

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi momen penting pertarungan partai politik untuk membuktikan diri sebagai partai yang mendapat kepercayaan dan dukungan masyarakat luas. Pada tahun 2015 yang lalu, perhelatan pemilihan Pilkada dilakukan serentak di seluruh daerah tingkat kabupaten/kota se-Indonesia. Partai politik melalui calon bupati/walikota dan wakilnya menjadi taruhan dan pertarungan harga diri sehingga segala upaya dalam bentuk apa pun dilakukan. Hanya ada satu tujuan, yakni menjadi pemenang dalam kompetisi yang selalu berjalan alot dan penuh drama serta tidak jarang berakhir ricuh akibat ketidak-puasan pihak yang kalah.

Partai politik sebagai pengusung para calon memiliki peran sentral dalam mewujudkan Pilkada dengan baik. Berbagai cara pun dilakukan dalam rangka menjadi pemenang, mulai dari cara konvensional seperti kampanye, penyebaran visi misi, publikasi calon di media massa, hingga cara-cara yang irasional dengan melibatkan 'dukun' atau para-normal politik, bahkan melibatkan agama. Padahal, politik itu sendiri adalah aktivitas yang sangat rasional. Boleh jadi, keinginan penggunaan jargon Islam dalam rangka bagaimana Islamisme diwujudkan di Indonesia, minimal dimulai dari tingkat kabupaten/kota. Salah satu cara yang belakangan ini digunakan oleh partai politik atau calon bupati/walikota dan wakilnya untuk meraih simpati masyarakat adalah penggunaan simbol-simbol agama dalam kampanye. Berbagai atribut agama diperkenalkan dan dikonstruksikan sebagai bagian dari diri dan program kerja calon yang

bersangkutan. Penggunaan simbol-simbol agama khususnya Islam menjadi titik awal bagaimana kuatnya upaya elite partai menggunakan instrumen agama (Islam) sebagai alat politik yang paling jitu untuk menggugah umat Islam.

Umat Islam menjadi sasaran utama mengingat secara sosiologis dan politis sangat kuat (Qodir, 2015: 327). Di Jawa Tengah, misalnya, umat Islam sangat dominan sehingga partai politik (bukan hanya partai politik Islam) berebut dengan pemilih yang sama. Apalagi, mayoritas pemilih (Islam) tergolong pemilih konvensional dan loyal (Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama serta Persis) yang sangat 'fanatik' dalam beragama. Selain mayoritas pemilih adalah Muslim, para calon yang diusung partai politik juga berasal dari kalangan Muslim. Tulisan ini difokuskan pada persoalan mengapa partai politik masih menggunakan simbol-simbol agama dalam kampanye untuk meraih simpati masyarakat?

KERANGKA KONSEPTUAL

Simbol Agama dan Ruang Publik

Sebuah simbol tentu saja memiliki makna khusus. Simbol dapat didefinisikan sebagai *"any object, act, event, quality, or relation which serves as a vehicle for a conception—the conception is the symbol's meaning"* (Clifford Geertz in Buck, 1999:12). Di bidang keagamaan, simbol selalu hadir menjadi bagian yang sangat penting bagi para pemeluknya. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika Geertz mendefinisikan agama sebagai sistem simbol.

A religion is a system of symbols which acts to establish powerful, pervasive, and long-lasting moods in men by formulating conceptions of a general order of existence and clothing those conceptions with such an aura of factuality that the moods and motivations seem uniquely realistic (Geertz, 1966).

Lebih jauh, Geertz menekankan bahwa simbol tersebut menciptakan kondisi emosi yang kuat, menyebar, dan bertahan lama. Selain itu, *'religious symbols inform and structure religious*

consciousness" dan "symbols are the illustrations of sacred ideas and ideal" (Buck, 1999:12). Meskipun simbol memiliki kedudukan penting dalam agama dan bagi pemeluknya, tidak semua simbol selalu dapat diperlihatkan di ruang publik (Evan, 2009:59). Ruang publik di sini diartikan sebagai *'the areas of public engagement which fall to be conducted or regulated by the state'* (Evan, 2009:76). Sejarah manusia telah menunjukkan tentang bagaimana simbol agama telah dipergunakan untuk memperkeruh konflik antar pemeluk agama, sehingga Negara memberlakukan kebijakan tertentu dengan melarang penggunaan simbol agama di ruang publik. Dengan kata lain, penggunaan simbol agama sangat berkaitan dengan respon dari penganut lain (Evan, 2009:66). Demikian pula, respons dari penganut lain tentu saja berkaitan dengan sejarah dan konteks masyarakat tertentu.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita menjumpai bahwa ekspresi pemeluk simbol agama di ruang publik selalu sesuai dengan konteks masyarakat jika ingin ekspresi tersebut tidak mendatangkan konflik. Inilah salah satu alasan mengapa, pemerintah turun tangan dalam hal ekspresi simbol agama di ruang publik dengan memberlakukan kebijakan dan peraturan tertentu.

Komodifikasi Agama

Kedudukan simbol agama yang signifikan membawanya pada persoalan komodifikasi agama. Simbol-simbol agama "dijual" di ruang publik demi memperoleh keuntungan. Komodifikasi agama saat ini telah menyebar di masyarakat luas di banyak Negara. Di masyarakat Islam Indonesia, komodifikasi agama semakin tampak jelas, di mana Islam ditransformasi menjadi komoditi simbolis (Turner, 2010:572). Berbeda dengan konsumerisme, komodifikasi agama berkaitan dengan ideologisasi komoditi atau menjual ideologi daripada produk (Lukens-Bull, 2008 in Hasan, 2014:184). Dalam kasus Islam,

Religious commodification has in fact very much to do with the way religion, in the case of Islam, is packaged and offered to a broader audience, and how this has produced a framework for the moral order of society through the objectification and systematization of Islamic values and practices as a normative model (Hasan, 2014:184)

Lebih jauh, interaksi antara Islam dan demokrasi menyebabkan simbol Islam menjadi penting dalam dinamika politik lokal. Hal ini karena simbol-simbol agama mampu melegitimasi kekuatan elit politik sebagai bentuk dari perlawanan terhadap oposisi termasuk militan Islam. (Hasan, 2014:190) Mobilisasi simbol agama memberikan pengaruh besar pada arena perpolitikan lokal di Indonesia. Para elit baru yang memiliki latar belakang santri mampu memberikan efek nyata yakni negosiasi ulang batas-batas kekuatan politik, pengaturan ekonomi, dan identitas diri. Dan tentu saja, hubungan dengan para ulama beserta pesantren mereka mendukung kekuatan elit baru ini (Hasan, 2014:190).

Untuk tujuan perolehan kekuatan politik dengan simbol agama, para penggunanya memberikan interpretasi yang dapat diterima secara luas demi tujuan politik praktis (Hasan, 2014: 191). Jadi, simbol agama memiliki peran penting dalam mobilitas politik karena memiliki legitimasi yang besar dalam menentukan posisi para elit dan dalam menghadapi lawan politik. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa lawan politik juga dapat menggunakan simbol yang sama dan memberikan interpretasi yang sesuai dengan kepentingan kelompok mereka sendiri. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan pada pemilihan lokal, pemimpin politik regional mengeksplotasi simbol agama dan berafiliasi dengan mayoritas dalam pengambilan keputusan (Hasan, 2014:191)

KEBUMEN: SEBUAH SETTING PENELITIAN

Sekilas tentang Lokasi Penelitian

Kabupaten Kebumen terletak di selatan pulau Jawa Tengah dan berbatasan dengan Kabupaten Purworejo di sebelah timur, Samudera Indonesia di sebelah selatan, Kabupaten Cilacap dan Banyumas di sebelah barat dan kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara di sebelah utara. Adapun luas Kabupaten Kebumen adalah 1.281,115 m² (ppid.kebumenkab.go.id).



Adapun jumlah penduduk Kabupaten Kebumen di tahun 2015 berdasarkan kecamatan yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Kecamatan	2015		
	Laki-laki	Perempuan	Total
01 Ayah	27775	27492	55267
02 Buayan	27170	27399	54569
03 Puring	26753	26342	53095
04 Petanahan	26812	26342	53154
05 Klirong	27374	27215	54589
06 Buluspesantren	26371	26292	52663
07 Ambal	27785	27375	55160
08 Mirit	22343	21914	44257

Kecamatan	2015		
	Laki-laki	Perempuan	Total
09 Bonorowo	9266	9399	18665
10 Prembun	13014	13505	26519
11 Padureso	6614	6802	13416
12 Kutowinangun	20766	21710	42476
13 Alian	27143	27297	54440
14 Poncowarno	7306	7715	15021
15 Kebumen	60579	61001	121580
16 Pejagoan	24310	24132	48442
17 Sruweng	26593	27240	53833
18 Adimulyo	16775	17602	34377
19 Kuwarasan	22084	22340	44424
20 Rowokele	21065	21561	42626
21 Sempor	29384	30238	59622
22 Gombang	23274	24421	47695
23 Karanganyar	16802	17449	34251
24 Karangayam	24659	24122	48781
25 Sadang	9304	8963	18267
26 Karangsambung	18776	18973	37749
KABUPATEN	590097	594841	1184938

Sumber: kebumenkab.bps.go.id, 2016.

Partisipasi Masyarakat dan Gambaran Umum Calon

Pada Pilkada 2015 tercatat partisipasi penduduk yang mempunyai hak pilih sebesar 65,02% yakni 1.078.711 orang. Dari jumlah ini, partisipasi laki-laki sebesar 60,91% atau 330.641

dari 542.825 penduduk laki-laki yang mempunyai hak pilih. Sedangkan partisipasi perempuan sedikit lebih tinggi yakni 69,12% atau 371.451 dari 537.426 penduduk perempuan yang mempunyai hak pilih. (pilkada2015.kpu.go.id/kebumenkab). Dalam kehidupan keagamaan, mayoritas masyarakat Kebumen adalah pemeluk agama Islam. Sebagian besar Muslim di Kebumen berafiliasi dengan organisasi massa Islam yakni Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama. Oleh karenanya, tidak mengherankan jika terdapat calon yang terkait dengan kedua organisasi tersebut. Pilkada pada 2015 di Kebumen melibatkan 3 calon Bupati dan Wakil Bupati dengan basis massa pemilih yang dinamis, namun terpolakan berdasarkan afiliasi organisasi keagamaan masing-masing calon.

(1) H. Khayub Mohammad Lutfi, SE dan H. Akhmad Bakhrun S.Sos, M.H



H. Khayub Mohammad Lutfi, SE merupakan pendiri Universitas Ma'arif Nahdatul Ulama. Namun, beliau tidak terdaftar sebagai pengurus dalam organisasi Nahdatul Ulama. Aktivitas H. Khayub Mohammad Lutfi, SE lebih banyak di sektor ekonomi sesuai dengan latar belakang keilmuannya. Sementara itu, pasangannya, H. Akhmad Bakhrun S.Sos, M.H bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang juga menjabat wakil ketua Tanfidziyah MWC NU

kecamatan Ayah. Pasangan calon ini didukung oleh partai Golkar, Partai Nasdem, dan PKS. (kebumennews.com)

Untuk meraih suara masyarakat Kebumen, pasangan ini menawarkan visi *mewujudkan ekonomi kerakyatan berbasis Agrobisnis menuju Kebumen Mandiri dan Sejahtera*. (kebumennews.com). Dari visi ini, tampak bahwa pasangan calon ini menitikberatkan kepada pembangunan ekonomi rakyat sebagai kunci memperoleh kemandirian dan kesejahteraan. Sementara tidak terlihat posisi agama dalam visi ini meskipun kemudian tertuang dalam salah satu misi, yakni *Meningkatkan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan prima untuk mewujudkan kehidupan masyarakat agamis berkarakter dan bermartabat*. (kebumennews.com) Yang menjadi pertanyaan adalah: *apakah absennya tema agama dalam visi yang ditawarkan mempengaruhi perilaku pemilih mengingat masyarakat Kebumen sangat kental dengan kehidupan beragama?*

(2) Ir. H. Mohammad Yahya Fuad, SE dan KH. Yazid Mahfudz



Ir. H. Mohammad Yahya Fuad, SE merupakan ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Gombang, sementara KH. Yazid Mahfudz adalah pengasuh pesantren al Huda, Kutosari yang juga merupakan adik dari KH. Wahib Mahfudz, Rais Syuriah Pengurus Cabang Nahdatul Ulama (PCNU) Kebumen. Bagi sebagian masyarakat, kolaborasi dari kedua organisasi Islam ini merupakan satu kejutan. (kebumenekspress.com). Hal ini karena koalisi calon berlatar belakang NU dan Muhammadiyah belum pernah terjadi sebelumnya. Pasangan ini memperoleh dukungan dari Partai Gerindra, Partai Demokrat, PKB, dan PAN.

Pasangan calon ini menawarkan visi *Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang sejahtera, unggul, berdaya, agamis dan berkelanjutan*. Berbeda dengan pasangan calon no. 1, pasangan calon ini memberikan ruang pada tema agama dalam visi mereka. Selain itu, penekanan posisi agama juga tampak dalam salah satu misi, yakni *Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial kemasyarakatan dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta pembangunan moral bagi seluruh elemen masyarakat (akhlakul karimah)*. Dalam misi ini, dinyatakan secara tegas pembangunan moral berujung pada *akhlakul kharimah*.

(3) H. Bambang Widodo SE, MM dan H. Sunarto,



Dalam riwayat yang diberikan saat pencalonan, Bambang Widodo mengatakan bahwa hobinya berorganisasi, namun hanya ada 2 organisasi yang beliau cantumkan dalam data riwayat yang diberikan kepada KPU, yakni menjadi ketua dalam organisasi ikatan Alumni SMA Purnama (Ikasmap) dan Ketua Ikatan Kanca Lawas Gombang (IKLG). Sementara itu, pasangannya Sunarto ST adalah presiden direktur/pemilik PT Uman Surya Alam. Beliau memiliki pengalaman organisasi lebih banyak, khususnya di bidang ekonomi perdagangan. (kebumennews.com). Oleh karena itu, kedua calon ini tidak bergabung dengan organisasi keagamaan. Mungkin dapat dikatakan bahwa pasangan calon ini mewakili kalangan nasionalis. H.Bambang Widodo SE, MM dan H. Sunarto mendapat dukungan dari partai PDIP dan Partai Hanura.

Visi yang ditawarkan calon no. 3 adalah *Kebumen bersatu maju dan sejahtera*. Pada visi pasangan ini juga tidak tampak adanya terma agama yang digunakan, ditambah lagi dalam misi-misi yang dituangkan pun isu agama tidak digunakan.

Pilkada Kebumen pada tahun 2015 dimenangkan oleh pasangan calon nomor 2, dengan rincian perolehan suara sebagai berikut:

1. Khayub Mohammad Lutfi, SE dan H. Akhmad Bakhrun, S.Sos., MH

2. Ir. H. Mohammad Yahya Fuad, SE dan KH. Yazid Mahfudz memperoleh 51, 13 % suara
3. Bambang Widodo SE, MM dan H. Sunarto, ST memperoleh 6,53% suara (pilkada2015.kpu.go.id/kebumenkab)

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, pasangan nomor urut 2 (dua), yaitu Ir. H. Mohammad Yahya Fuad, SE dan KH. Yazid Mahfudz mendapatkan dukungan dari beberapa partai berbasis massa Islam, yakni PKB, PAN, dan PPP. Dari partai-partai yang berbasis massa Islam, hanya partai PKS yang tidak memberikan dukungan kepada calon no. 2 karena PKS berkoalisi dengan partai Nasdem dan partai Golkar mendukung pasangan calon no. 1 Khayub Mohammad Lutfi, SE dan H. Akhmad Bakhrun, S.Sos., MH. Bagaimanapun, koalisi PKB dan PAN dalam pilkada 2015 ini diyakini akan mempengaruhi posisi umat Islam dalam perpolitikan di Kebumen. (kebumenekspress.com).

Dalam meraih kemenangannya, pasangan calon no.2 Ir. H. Mohammad Yahya Fuad, SE dan KH. Yazid Mahfudz tidak hanya mendapat dukungan dari partai politik tetapi juga dari ormas Islam di Kebumen yakni Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama. Pernyataan dukungan kedua ormas Islam ini disampaikan oleh KH. Masykur Rozak, Ketua Pengurus Cabang Nahdatul Ulama (PCNU) dan Abduh Hisyam, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) dalam acara Silaturahmi di Pondok Pesantren al Kamal di Desar Tambah Sari, Kecamatan Kuwarasan, Kebumen. Dalam acara tersebut KH. Masykur Rozak mengatakan :

untuk pertama NU dan Muhammadiyah di Kebumen menyamakan persepsi untuk menggalang kekuatan mewujudkan pemimpin Kebumen yang rahmatan lil alamin. Sudah saatnya Kebumen dimotori NU dan Muhammadiyah.

(fuad-yazid-
kebumen.blogspot.co.id)

Dukungan warga Muhammadiyah terhadap Yahya Fuad tampak jelas saat mereka membentuk relawan 1912 untuk mengawal jalannya pilkada dan mensukseskan Yahya Fuad menjadi Bupati Kebumen. (sangpencerah.id)

Kemenangan pasangan ini memberikan simbol kebersamaan NU dan Muhammadiyah. Imam Satibi mengatakan: "Kini yang terpenting NU dan Muhammadiyah harus bersatu, sebab Kyai Syeh Hasyim Asy'ari pendiri NU dan KH. Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah satu guru mbah Kholil Bangkalan, Madura." (kebumennews.com). Bagi Ketua Tanfidziah NU Kebumen, Masykur Rozaq, NU dan Muhammadiyah sudah saatnya bersatu, "Sekarang Muhammadiyah sudah sama dengan NU, Muhammadiyah tidak lagi membid'ah- bid'ahkan amalan warga NU lagi."

Di Kebumen, massa NU dan Muhammadiyah sangat besar sehingga mempersatukan dukungan warga kedua ormas Islam ini merupakan salah satu langkah yang dapat diambil. Salah satu cara adalah dengan menjadikan salah satu warganya sebagai calon dalam Pilkada. Sebelum hasil pilkada diperoleh, koalisi pasangan calon berlatar belakang NU dan Muhammadiyah ini mendapatkan respon positif dari beberapa kalangan yang telah memperkirakan bahwa pasangan dengan kolaborasi warga NU dan Muhammadiyah akan menjadi pemenang pilkada. Budayawan Kebumen, Syahri Wahab, misalnya, meyakini bahwa jika partai politik yang memiliki basis NU dan Muhammadiyah bersatu dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati, hampir dapat dipastikan pasangan calon tersebut akan memperoleh kemenangan. Hal ini karena jumlah pemilih dari kedua organisasi masyarakat tersebut sangat besar di Kebumen. (radarbanyumas.co.id)

Kemenangan pasangan calon Ir. H. Mohammad Yahya Fuad, SE dan KH. Yazid Mahfudz sebenarnya telah dapat diperkirakan mengingat jumlah kursi yang diperoleh oleh masing-masing partai berbasis massa NU dan Muhammadiyah.

Perolehan kursi partai politik pada pemilihan legislatif tahun 2014 adalah

1. PAN memperoleh 73.356 suara (7 kursi)
2. PKB memperoleh 77.505 suara (6 kursi)
3. PKS memperoleh 50.355 suara (3 kursi)
4. PPP memperoleh 44.351 suara (3 kursi)

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dari keempat partai berbasis massa Islam ini, hanya PKS yang tidak mendukung pasangan calon Ir. H. Mohammad Yahya Fuad, SE dan KH. Yazid Mahfudz. Namun demikian, jumlah dukungan yang diberikan PAN, PKB, dan PPP sangat signifikan meski tanpa dukungan dari PKS. (radarbanyumas.co.id)

SIMBOL AGAMA DALAM PILKADA

Agama dalam konteks Indonesia tidak hanya terkait dengan persoalan ideologis, tetapi juga menyangkut persoalan politik. Agama yang dikenal sebagai 'agama yang diakui' hanya enam. Keenam agama tersebut menjadi payung bagi penganutnya masing-masing. Bahkan, kelompok-kelompok agama yang ada di luar keenam agama tersebut dianggap sebagai agama sempalan karena tidak memiliki 'nomenklatur' dalam sistem keagamaan di Indonesia. Agama-agama lokal yang sarat dengan ciri khas Indonesia perlahan terpinggirkan oleh dominasi agama-agama yang mendapat dukungan negara. Mereka pun akhirnya melebur ke dalam salah satu agama dengan segala bentuk kepentingan (Hasse J, 2016). Kondisi ini, bagi pemeluk agama tertentu, bukan hanya persoalan teologis, tetapi juga merupakan persoalan politik. Ini sekaligus menunjukkan bahwa agama bagi masyarakat Indonesia sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan, termasuk politik.

Dalam urusan politik, dalam satu dekade terakhir khususnya pasca runtuhnya kekuasaan Orde Baru, masyarakat Indonesia sangat antusias untuk terlibat atau sekadar mengikuti perdebatan dan perbincangan mengenai politik Indonesia yang sangat dinamis dan terbuka. Kehadiran partai politik baru pasca Orde Baru melengkapi keinginan dan saluran politik masyarakat yang sebelumnya

dikekang dan ditekan serta dikontrol oleh penguasa. Era Reformasi hadir dengan segala bentuk 'kebebasan' termasuk berpolitik menempatkan siapa saja memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi termasuk mendirikan partai politik dengan berbagai dasar dan landasan ideologis. Partai-partai politik mengusung ideologi masing-masing untuk mencapai tujuannya. Kekuasaan diraih dengan segala cara, bahkan menggunakan agama sebagai salah satu alat di tengah ketaatan masyarakat Indonesia terhadap agamanya. Muncullah kemudian partai politik yang berbasis agama dan non-agama yang dikenal dengan partai religius dan nasionalis, serta religius nasionalis (Qodir, 2015).

Kemunculan partai politik khususnya partai politik berbasis agama (Islam) bukanlah hal baru. Sebab, pada era Orde Lama telah ada Masyumi sebagai partai yang berideologi Islam. Hanya saja, partai ini tidak berumur panjang akibat berbagai persoalan yang meliungkupinya termasuk tekanan penguasa kala itu. Bahkan pada era Orde Baru, partai ini tidak ada lagi yang digantikan oleh partai politik yang masih menggunakan Islam sebagai ideologinya, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sekali lagi, partai ini pun kemudian hanya menjadi 'pelengkap penderita' perpolitikan nasional. Dominasi penguasa melalui Partai Golongan Karya (Golkar) menyebabkan PPP tidak berkembang. Bahkan Partai Demokrasi Indonesia mengalami nasib yang lebih tragis lagi, selalu menjadi tempat terjadinya kecurangan politik. Baik PPP dan PDI di era ini dipertahankan dalam rangka menunjukkan ada 'kontestasi' sehingga Golkar selalu mendapat 'kompetitor', meskipun sangat ringan.

Pada era Orde Baru, PPP sebagai partai politik Islam telah menggunakan Islam sebagai jargon utamanya yang diikuti oleh penggunaan Ka'bah sebagai simbolnya. Meskipun dalam perkembangannya berganti dari Ka'bah menjadi Bintang, kemudian kembali lagi ke Ka'bah. PPP di era tersebut dikenal luas sebagai partai Islam, namun tidak pernah memang meskipun berada dan lahir di tengah mayoritas penduduk Indonesia yang Muslim. Penggunaan simbol dan jargon Islam pada

partai ini sangat kuat yang ditandai pula oleh komposisi kepengurusan partai yang banyak diisi oleh tokoh-tokoh Islam seperti kiai dan elite-elite Islam lainnya. Bahkan, tidak jarang pondok pesantren sebagai representasi lembaga pendidikan Islam dijadikan ajang kampanye partai ini menjelang pemilihan umum. Hal ini tidak terlepas dari keterlibatan elite pesantren dalam kepengurusan partai sehingga lembaganya pun, sadar atau tidak, dibawa ke dalam pusaran politik praktis.

Saat ini, setelah kurang lebih 71 tahun kemerdekaan dan setelah 18 tahun reformasi, kemunculan partai Islam tetap saja marak dengan segala kondisi yang dihadapi masing-masing. Bahkan, ada partai politik yang bergonta-ganti ideologi, dari Islam menjadi nasionalis dan seterusnya. Di era multi-partai, kemenangan partai Golkar di era keemasannya, Orde Baru, sulit terulang. Kemunculan beberapa partai yang notabene orang-orangnya berasal dari partai tersebut dianggap salah satu penyebab 'kemunduran' dalam perolehan suara setiap pemilu/pemilukada. Demikian pula, tingkat kecerdasan dan kepercayaan publik pemilih juga dianggap berkontribusi pada penyebaran pilihan masyarakat Indonesia. Di samping itu, kemunculan banyak partai menjadikan pilihan pemilih semakin banyak sehingga juga terjadi distribusi suara pemilih yang tidak terkonsentrasi pada satu partai tertentu.

Sejauh ini, hanya ada dua partai yang dikenal dengan Partai Politik Islam, yaitu PPP dan PKS (Partai Keadilan Sejahtera). Keduanya dikategorikan sebagai partai politik Islam karena menggunakan Islam sebagai dasar atau ideologi partai. Adapun PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) dan PAN (Partai Amanat Nasional) tidak dikategorikan sebagai partai Islam karena dasar/ideologi partainya adalah Pancasila, meskipun kedua partai ini sangat dekat Islam (termasuk organisasi) dan memiliki basis massa dari kelompok Islam (khususnya NU dan Muhammadiyah). Akan tetapi, partai-partai ini selalu menggunakan Islam sebagai jargon dan alat kampanye dengan berbagai modifikasi yang memiliki tujuan yang sama, menggunakan simbol Islam untuk menjangkau publik

pemilih dan meraih suara sebanyak-mungkin dari pemilih yang beragama Islam.

Simbolisasi Agama: Upaya Meraih Dukungan Publik

Salah satu pertanyaan yang mengemuka jika menghubungkan Islam dengan pemilu/pemilukada adalah mengapa simbol-simbol agama digunakan dalam setiap pemilu/pemilukada? Ada beberapa hal yang dapat dijadikan rujukan atau jawaban mengenai hal ini. *Pertama*, realitas masyarakat Indonesia yang religius yang, minimal, ditandai oleh pilihan afiliasi agama yang tertera dalam kartu identitasnya. Hampir seluruh masyarakat Indonesia memiliki agama dan dengan tegas diakuinya melalui pencantuman di dalam dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sebanyak 87 % (ada yang menyebut 82 %) masyarakat Indonesia pemeluk Islam. Kondisi ini mendorong elite partai menggunakan isu agama sebagai salah satu metode menarik simpati massa pemilih. Realitas jumlah tersebut memang memberikan peluang bagi partai Islam untuk meraih suara berdasarkan rasionalitas pilihan yaitu kesamaan ideologi Islam.

Kedua, agama dianggap masih memiliki dan menjadi magnet untuk menarik perhatian dan simpati. Hal ini misalnya dapat dilihat dari sensitivitas umat beragama ketika memunculkan isu agama dan diresponsnya dengan cepat. Isu penodaan terhadap Islam yang dilakukan oleh Ahok (Basuki Cahaya Purnama), Gubernur DKI Jakarta, beberapa waktu lalu menunjukkan bahwa isu agama sangat sensitif di Indonesia. Respons umat Islam dan beberapa kelompok Islam dengan reaktif menyikapi hal tersebut. Ini menjadi bukti bagaimana Islam di Indonesia masih mampu memancing perhatian umat sehingga dalam konteks pemilu dan pemilukada pun masih digunakan. Bahkan, Robert W. Hefner menyatakan bahwa Islam tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk hubungannya dengan demokrasi. Demokrasi Indonesia salah satunya hanya bisa dicapai melalui Islam. Artinya, Islam menjadi faktor antara antara meraih demokratisasi. Hal ini menunjukkan bahwa Islam

memiliki posisi yang sangat sentral dan strategis dalam dinamika kehidupan masyarakat atau bangsa Indonesia.

Ketiga, kurang kreatifnya elite (parpol) dalam menentukan metode atau cara menarik simpati pemilih. Agama, dalam hal ini Islam, semakin dipaksakan untuk digunakan alat kampanye dalam berbagai modelnya. Islam pun dianggap hanya terbatas pada alat, dengan cenderung mengabaikan sakralitas Islam itu sendiri. Oleh karena itu, elite partai pun kemudian menggunakan Islam sesuai kehendak dan kepentingannya dengan menafikan fungsi asal Islam sebagai pedoman hidup (*way of life*) manusia yang di dalamnya berisi tentang ajaran luhur mengenai keselamatan. Akibatnya, Islam pun dipahami dengan sangat dangkal sehingga diperlakukan sesuai kepentingan politik yang ingin dicapai, meskipun dengan cara 'merendahkan' Islam. Akibatnya, masyarakat pun kemudian sulit menentukan antara ajaran Islam yang harus ditegakkan dengan keinginan segelintir orang yang menggunakan Islam sebagai alat politiknya dalam mewujudkan kepentingan yang diusungnya.

Keempat, sikap kritis umat mulai semakin memudar. Bagi para elite politik, cara apapun legal dilakukan demi mewujudkan kepentingan partai atau kelompoknya. Berbagai cara pun dilakukan mendekati pemilih (konstituen). Mereka (elite) bahkan tidak mempedulikan adanya perbuatan yang menyimpang dalam cara atau metode yang dilakukan. Pemberian uang (*money politics*) misalnya merupakan salah satu contoh pembodohan yang dilakukan. Hal ini diperparah oleh sikap masyarakat pemilih yang justru mempergunakan kondisi tersebut untuk meraih keuntungan. Apa yang diberikan oleh para elite atau politisi pun diterimanya meskipun ada risiko yang harus diterima di balik semua 'kebaikan' itu. Misalnya, umat atau masyarakat sangat muda dipengaruhi dan diajarkan objek politik yang hanya menguntungkan salah satu pihak. Umat atau masyarakat hanya diperhatikan ketika menjelang pemilihan. Apa yang terjadi hingga saat ini mendukung argumentasi ini di mana para elite atau politisi terus mendegungkan beragam program yang akan diterapkan setelah

terpilih. Akan tetapi, semua itu hanyalah cara yang dilakukan untuk meraih suara karena setelah terpilih pun program yang dijanjikan tidak terealisasi dengan berbagai alasan.

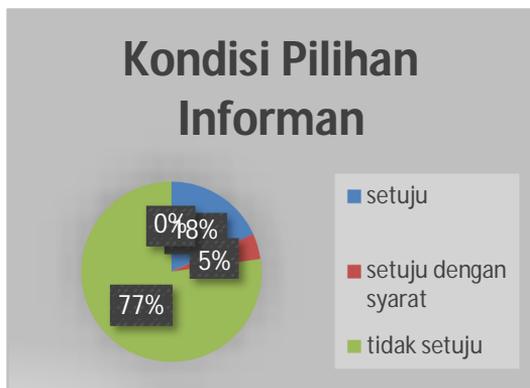
Islam, atau beberapa terminologi yang berkaitan erat dengannya, dalam kampanye digunakan dalam beberapa kondisi dan bentuk. *Pertama*, dalam bentuk ungkapan kata. Misalnya, penggunaan kata Islam taat, Muslim sejati, Haji/Hajjah, turunan kiai, dan sebagainya merupakan pilihan yang sangat umum digunakan oleh kelompok atau orang yang berkepentingan. Tentu saja, hal tersebut dianggap sarat dengan kepentingan politik. Dalam masa kampanye, seseorang (calon anggota legislatif atau kepala daerah) dengan tegas mendefinisikan diri sebagai orang beragama Islam, muslim taat, bergelar haji/hajjah, dan sebagainya. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dari penulisan nama yang terpampang di berbagai fasilitas kampanye seperti baliho, poster, dan media lainnya termasuk di media massa (cetak). Pertanyaannya kemudian adalah apakah atribut-atribut tersebut ada hubungannya dengan politik? Mengingat isu Islam sangat penting dalam segala bentuk kehidupan di Indonesia, maka ia pun diperlakukan dan dipergunakan dalam berbagai bentuk kepentingan. Islam pun digunakan dalam segala hal, dengan mengesampingkan tujuan dan esensi Islam itu sendiri yang dengannya akan membawa penganutnya meraih kebahagiaan yang bersifat kekal.

Kedua, dalam bentuk ungkapan slogan. Tidak jarang, seseorang calon anggota legislatif atau kepala daerah mengklaim masih memiliki silsilah/genealogi ulama atau kiai. Slogan yang digunakan pun selalu terkait dengan kapasitasnya sebagai keluarga *santri*, bukan *abangan*. Ia pun selalu menunjukkan dan mereproduksi diri sebagai orang yang taat melalui berbagai ungkapannya. Misalnya, dengan kefasihan melafalkan terminologi Arab seperti *insyaallah*, dan sebagainya. Padahal, dalam banyak kesempatan, ia sangat jarang menggunakan kata tersebut sebelumnya. Reproduksi kesalahan diri dilakukan melalui penggunaan terminologi Arab yang sangat 'dekat' dengan Islam tentunya. Hal ini kemudian menjadikannya, oleh pemilih,

sebagai orang saleh dan taat beragama. Intensitas mengunjungi tempat-tempat ibadah, ibadah berjamaah misalnya, sangat intens menjelang waktu pemilihan sehingga membuka mata orang banyak mengenai komitmennya dalam beragama (Islam). Konstruksi dan reproduksi kesalahan ini kemudian didukung oleh penampilan yang selalau 'agamis' di pelaku dalam setiap kesempatan. Tidak hanya itu, respons masyarakat terhadap aksi seperti ini pun kurang proporsional dan cenderung membiarkannya tanpa kritik sehingga keuntungan yang dicari pun terus dituai oleh mereka (si pelaku).

Ketiga, simbol atau atribut (fisik dan non-fisik). Metode ini yang paling lazim dan mudah digunakan. Berbagai foto yang tersebut di beberapa sudut tempat tampil dengan kostum 'islami' yang ditampilkan dengan berbagai asesoris yang selama ini lekat dengan Islam. Misalnya, baju yang dipakai sangat identik dengan baju yang digunakan dengan orang-orang 'alim (ulama) dan busana-busana Muslim/muslimat lainnya. Asesoris-asesoris yang melekat di badannya dengan cepat ditebak bahwa ia adalah Muslim (taat). Dalam setiap penyelenggaraan kegiatan keagamaan seperti tablik akbar, istigozah, dan pertemuan/pengajian keagamaan lainnya tidak pernah absen. Demikian seterusnya, setiap aktivitas yang dilakukan selalu mengarah pada pembentukan identitas diri sebagai pribadi yang saleh dan pro Islam. Tidak hanya berhenti di situ, mereka juga dengan rajin mengunjungi lembaga-lembaga pendidikan agama seperti madrasah dan pesantren. Mereka bahkan 'ringan tangan' dengan memberikan bantuan berupa dana untuk proses pembelajaran di lembaga yang dituju.

Dari informasi yang diperoleh di lapangan, terdapat pro dan kontra mengenai penggunaan simbol Islam kampanye. Dari 21 informan yang diwawancarai, sebanyak 17 orang yang kurang/tidak setuju jika simbol agama (Islam) digunakan dalam pilkada, hanya ada 4 orang yang setuju, dan 1 orang lagi setuju penggunaan simbol Islam, tetapi dengan beberapa syarat.



Dari komposisi data tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa umumnya informan tidak menyetujui jika simbol Islam digunakan dalam pilkada atau pemilukada. Di antara informan tersebut bahkan secara tegas menegaskan bahwa meskipun simbol sangat penting, namun bukan pada tempat jika ia dilibatkan dalam perhelatan pilkada atau pemilukada. Adapun informan yang lain, mengatakan bahwa simbol Islam digunakan dalam pesta demokrasi tidak masalah karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat religius. Arini (31) misalnya menyetujui jika simbol Islam digunakan dalam kampanye. Ia menegaskan bahwa, "Saya setuju. Karena sesuatu yang dilakukan tidak akan lepas dari sektor agama. Apa yang dikerjakan harus berdasar pada nilai-nilai agama, tidak boleh menyimpang dari ajaran agama" (Wawancara, Arini, [31], Guru, Kebumen, 21 Januari 2017).

Pendapat ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Siti Radiatun (42) bahwa,

"dalam kondisi kebhinekaan sangat memungkinkan pasangan calon bupati/walikota dari berbagai agama, dengan menggunakan agama sebagai alat kampanye akan memberikan gambaran atau identitas pasangan-pasangan tersebut yang diketahui dari tanggapan-tanggapan mengenai isu agama yang dilontarkan" (Wawancara, SR [42], Guru, Kebumen di Kebumen, 21 Januari 2017).

Bahkan, menurut informan Elli Nurrochmah (27), agama (Islam) sangat penting dan tidak masalah jika digunakan dalam kampanye. Ia menegaskan bahwa, "agama merupakan alat pemersatu dan menjadi dasar atau patokan dalam sebuah pengambilan keputusan" (Wawancara EN [27], Karyawan Swasta, Kebumen, 11 Maret 2017).

Para informan tersebut melihat agama (Islam) sebagai media untuk menebarkan kebaikan sehingga di mana pun ia dapat digunakan. Islam sendiri, menurut mereka, merupakan aspek yang tidak pernah hilang dan absen dalam kehidupan. Apa pun profesi, kondisi, peristiwa dan sebagainya sebaiknya melibatkan Islam, tidak terkecuali pada persoalan kampanye. Hal ini sesungguhnya merupakan paradigma yang mengarah pada apa yang disebut dengan islamisasi kampanye. Artinya, nilai-nilai Islam dapat menjadi acuan dalam kampanye sehingga kedamaian dan sebagainya dapat diperoleh.

Sementara itu, para informan yang tidak menyetujui penggunaan simbol-simbol Islam dalam kampanye pilkada/pemilukada umumnya menyoroti posisi agama itu sendiri yang suci dan tidak seharusnya terkontaminasi oleh kepentingan politik praktis. Islam adalah agama Allah yang suci dan memiliki peran mulia di dunia. Islam bukan alat politik sehingga ia harus jauh dan dijauhkan dari kepentingan politik. Islam bukanlah alat untuk mencari kekuasaan. Suyitno (47) misalnya sangat tidak setuju jika simbol Islam digunakan pada pilkada/pemilukada. Menurutnya,

"agama bukan merupakan bagian dari politik. Tetapi agama adalah merupakan alat contoh dari politik. Ada sebuah selogan yang mengatakan "agama bukan politik tetapi politik harus beragama" (Wawancara, SY [47], Guru, Banyumas, 10 Desember 2016 di Purwokerto).

Pendapat yang lebih ekstrim lagi dikemukakan oleh salah seorang informan asal Kebumen. Misbakhussurur (23) mengatakan bahwa,

"... pemimpin itu bukan milik perorangan, lembaga apalagi agama. Sehingga tidak pantas jika agama digunakan sebagai alat kampanye. Tapi pemimpin dalam suatu daerah adalah milik semua, milik bersama (pada daerah masing-masing) yang tidak hanya mencakup 1 ras, agama, tapi semua aspek" (Wawancara, MS [23], Guru, Kebumen, 14 Maret 2017).

Di lain pendapat, A Mughis F (25) meskipun tidak setuju jika simbol Islam digunakan dalam kampanye, namun ia tetap mengakui bahwa sebaik-baik pemimpin adalah Islam. Artinya, Islam harus ada dalam proses pemilihan kepemimpinan itu. Ia mengungkapkan bahwa,

"... dalam islam sudah jelas ditekankan sebaik-baik pemimpin adalah yang beraga islam. Maka karena itu sadah menjadi wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan menjadi petunjuk hidup bagi umat islam. Sudah seharusnya *sami'na wa ato'na*(Wawancara, AMF [25], Brebes, di Kebumen 23 Maret 2016).

Pendapat di atas hampir sama dengan apa yang diutarakan oleh Yudha F. Andri (23) bahwa,

"...Agama adalah aqidah bukan alat mencari kekuasaan. Tetapi dalam memilih pemimpin, saya sebagai muslim tetap berlandaskan ajaran Islam" (Wawancara YFA [23], Mahasiswa, Kebumen, 23 Maret 2016).

Singkatnya, para informan tersebut menempatkan Islam sebagai sesuatu yang suci sehingga sebaiknya tidak dicampur-adukkan dengan kepentingan lain seperti politik. Politik itu 'kotor', sedangkan Islam itu suci, demikian argumen mereka. Agama dalam hal ini Islam merupakan media berkomunikasi dengan Allah sehingga ia digunakan dalam kerangka ibadah, artinya tidak etis kiranya jika agama Islam dijadikan kedok untuk meraih kepentingan politik.

Ketika peneliti mengajukan pertanyaan seputar banyaknya politisi yang menggunakan isu adama dalam kampanye, mereka umumnya sepakat

dan menilai bahwa kondisi mayoritas Islamlah menjadi salah satu alasan penggunaan simbol Islam dalam pilkada. Demikian pula, agama (Islam) masih sangat kuat daya tariknya di kalangan masyarakat. Usman Amrullah (27) misalnya mengatakan,

"... iklim masyarakat bangsa kita kalo disinggung mengenai hal-hal yang sifatnya mengatasnamakan agama masing-masing pasti akan tergugah dalam hatinya timbul seperti satu agama akan lebih dibela..." (wawancara, UA [27], Wirausaha, Kebumen, 12 April 2017).

Pendapat di atas sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh M. Amin Rasyid (25) bahwa, "...para politisi menggunakan isu agama untuk kepentingan politik, karena mereka ingin mengambil hati masyarakat agar dipilih". Artinya, Islam sebagai alat bagaimana meraih simpati pemilih yang memang mayoritas Muslim. Islam masih ampuh digunakan untuk memancing perhatian sehingga menurut informan, Islam pun tetap laku dan terus dipergunakan oleh para politisi untuk memenuhi kepentingannya.

Jika dilihat intensitas penggunaan simbol agama Islam dalam setiap pemilu/pemilukada dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Di pinggiran jalan raya, sudut-sudut kota, perempatan jalan, bahkan tempat-tempat umum tidak lepas dari pemandangan seperti ini. Penggunaan simbol Islam menjadi pilihan karena selama ini yang banyak digunakan oleh kelompok atau partai mana pun. Selain partai Islam, partai-partai lain pun sesungguhnya menggunakan simbol Islam sebagai salah satu media kampanyanya. Misalnya, pengumpulan massa dalam acara doa bersama, zikir akbar, istiqotsah, dan berbagai acara lain yang melibatkan massa dalam jumlah banyak. Efektivitas penggunaan simbol Islam dapat dikatakan tidak signifikan. Sebab, masyarakat pemilih telah memiliki kecerdasan dan pilihan sendiri meskipun tidak dilabeli oleh embel-embel agama pada setiap calon yang dipilih. Hal ini dibuktikan oleh semakin merosotnya peraihan suara partai Islam dari pemilih ke pemilu. Bahkan, partai Islam tidak pernah

menjadi pemenang dalam setiap penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia.

Hanya saja, ada risiko yang harus dipikul, bukan hanya oleh pemilih tetapi juga elite politik, jika menggunakan agama dalam ajang seperti pilkada. Apabila simbol dan ekspresi keagamaan masuk ke wilayah publik, baik ormas, partai politik maupun negara, aspirasi satu agama akan bertemu atau mungkin berbenturan dengan aspirasi agama lain. Mengingat ruang publik adalah ruang bersama yang sangat plural dan diatur dengan etika dan hukum positif. Sekalipun bisa saja sumbernya dari nilai-nilai agama dan etika moral kemanusiaan. Simbol dan kaidah agama yang dominan pada wilayah pribadi dan komunal ketika memasuki ruang publik dan negara mesti berkompromi dan taat pada dominasi hukum positif. Mengingat Indonesia bukanlah negara agama. Negara kita terdiri dari multi agama, multi etnis dan budaya.

Kompromi antara Legitimasi Elite Agama dan Politik Praktis

Selain menggunakan simbol-simbol agama sebagai alat meraih suara, partai politik juga melibatkan elite agama dalam merebut posisi tertinggi. Elite agama seperti kiai, ustadz, dan tokoh yang memiliki reputasi baik di tengah masyarakat dijadikan 'tandem' atau partner kampanye. Keterlibatan mereka pun lebih didasarkan pada hubungan yang saling 'menguntungkan'/symbiosis mutualistik. Baik partai politik maupun elite memiliki kepentingan masing-masing yang sesungguhnya, pada satu sisi dapat disebut sebagai upaya mendakwahkan Islam, dan menjerumuskan Islam pada sisi lain. Para elite agama melalui pelibatan mereka di dunia politik akan mampu memberikan warna pada politik itu sendiri melalui kapasitasnya sebagai tokoh yang memiliki pengaruh dan pengetahuan agama yang kuat. Agama pun kemudian menjadi landasan berpolitik. Sebaliknya, jika tidak berhasil justru yang terjadi adalah agama bukannya sebagai pijakan atau dasar, tetapi sebagai alat politik.

Kehadiran dan keterlibatan elite agama dalam politik dapat dilihat sebagai upaya melakukan transformasi politik; dari yang sekular ke agamis.

Hanya saja, jika tidak berhasil maka yang terjadi adalah elite agama hadir sebagai bentuk legitimasi terhadap pelibatan agama dalam politik. Pada kondisi seperti ini, elite agama justru tidak mewarnai politik dengan corak keislaman, tetapi sebaliknya justru membawa Islam ke dalam ranah yang kurang sesuai dengan 'kodrat' agama sebagai sesuatu yang 'sakral'. Elite agama hadir seakan merestui perilaku-politikis yang kemungkinan justru bertentangan dengan nilai-nilai luhur Islam itu sendiri. Misalnya, semangat penghargaan terhadap kelompok lain tidak lagi dominan, justru sikap saling membenci yang semakin mengental di kalangan umat Islam sendiri akibat perilaku elite yang keluar dari pakem aslinya, sebagai penegak dan penjaga marwah Islam berubah menjadi pelaku politik (politikus). Saling serang terhadap partai politik, individu, kelompok, dan pendukung semakin menyeruak yang sangat bertolak-belakang penyebaran nilai-nilai luhur Islam yang menjunjung tinggi semangat penghargaan terhadap orang atau kelompok lain.

Keterlibatan para elite agama dalam politik praktis memberikan penjelasan betapa agama dan politik itu tidak bisa dipisahkan begitu saja. Padahal, ada asumsi yang berkembang di tengah masyarakat beragama bahwa 'politik itu kotor' karena di dalamnya tidak ada kekekalan kecuali kepentingan. Artinya, saat ini boleh jadi seseorang akan menjadi kawan, dan di waktu yang lain akan menjadi lawan. Perkawanan dan lawan ditentukan oleh kepentingan apa yang akan diperoleh secara bersama-sama. Ketika kepentingannya berbeda, maka secara otomatis pertemanan pun akhirnya berubah menjadi lawan (oposisi). Demikian seterusnya. Oleh karena itu, banyak pihak yang teguh menghindari politik praktis dengan alasan demikian. Akan tetapi, di sisi lain juga justru elite agama memiliki pandangan yang berbeda. Untuk memasukkan unsur agama dalam kekuasaan harus dilakukan melalui jalur politik/partai politik. Atas dasar argumentasi ini, pilihan mereka untuk terjun ke dunia politik praktis pun dianggap sesuatu yang lazim.

Meskipun elite merupakan kelompok minoritas, namun karena pengaruhnya yang cukup

besar mengkiatkan mereka memperoleh posisi yang sangat tinggi di tengah masyarakat. Kemampuan elite biasanya didukung oleh tidak hanya kharisma, tetapi juga dukungan finansial. Mereka memiliki kemampuan di segala lini. Hal inilah kemudian yang membentuk dirinya sebagai figur atau tokoh yang dianggap mampu memberikan sesuatu yang lebih kepadamasyarakat luas. Elite kemudian terus melakukan berbagai upaya mempertahankan legitimasi dan pengaruhnya dengan berbagai cara termasuk rela mengeluarkan dana dalam jumlah yang tidak sedikit dan setiap kesempatan.

Antara elite dan partai politik tidak bisa dipisahkan. Dalam sebuah masyarakat, keberadaan elite yang ditokohkan memberikan pengaruh khususnya pada aspek keikut-sertaan orang banyak terhadap dirinya. Pengaruhnya yang cukup kuat tadi mampu mengubah kondisi masyarakat termasuk persoalan pilihan politik yang selalu diarahkan untuk memilih dirinya. Partai politik pun selalu mencari tokoh yang sekiranya mampu menarik simpati orang banyak dan menjadi pemilih loyalnya. Di sinilah dapat dilihat bagaimana keterkaitan keberadaan elite dengan keberlangsungan sebuah partai politik. Meskipun diakui bahwa hubungan yang erat seperti ini saling menguntungkan dan tentu saja memiliki banyak akibat termasuk di dalamnya 'perselingkuhan' antara elite ketika berkuasa dengan partai yang membawanya pada tampak kekuasaan. Prinsip balas jasa pun tidak hilang begitu saja. Tentu saja, seseorang yang terpilih akan mengabdikan diri sebagian untuk partainya.

Keterkaitan antara elite agama dengan perilaku politik terletak pada dampak yang ditimbulkan oleh setiap tindakan. Elite agama, walau bagaimanapun, tetap dianggap sebagai representasi dari sebuah komunitas atau kelompok. Di sini pula ada hubungan yang saling mendukung dan menguntungkan ketika seseorang (elite) menempatkan diri sebagai figur panutan yang diikuti oleh perilaku politik yang mencerminkan nilai agama itu sendiri. Akan tetapi, jika yang terjadi justru sebaliknya maka hal ini pun berdampak pada posisi elite agama yang dianggap mengurangi

sakralitas agama itu sendiri. Elite agama memiliki legitimasi kuat dalam 'menyuarakan' dan 'memperjuangkan' agama meskipun sering yang terjadi justru atas dasar pemenuhan kepentingan pribadinya.

Pada suatu kesempatan, peneliti mempertanyakan mengenai seperti apa peta pilihan informan jika pasangan calon pemimpin (bupati/walikota dan wakilnya) terdiri atas pasangan Muslim-Muslim dan Muslim-Non Muslim dan sebaliknya, mereka sepakat memilih pemimpin yang berkomposisi Muslim-Muslim. Faizin (47) misalnya, seorang PNS asal Purbalingga menegaskan bahwa, " ... karena orang muslim paham akan ajaran agama yang Allah SWT ajarkan melalui para nabi dan rasulnya". Sementara itu, Siti Radiatun (42) mengatakan bahwa saya memilih komposisi Muslim-Muslim karena,

"...saya menyakini bahwa seorang pemimpin harus seiman dengan kita. Bagaimanapun seorang pemimpin akan mengambil kebijakan berdasarkan apa yang dia pahami, bagaimana dia akan berpihan dengan Islam (kebijakan-kebijakanya) jika dia sendiri tidak memahami Islam" (Wawancara, SR [42], Guru Swasta, Kebumen, 13 Januari 2017).

Tampaknya, umumnya masyarakat Muslim masih memomorsatukan pilihan berdasarkan kesamaan ideologisnya dibandingkan dengan kelebihan lain yang dimiliki para calon pemimpinnya. Hal ini menegaskan bahwa sesungguhnya unsur agama, khususnya Islam, tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat Indonesia termasuk kehidupan politiknya.

Sesungguhnya, apa yang ingin dibangun oleh mereka yang menggunakan agama sebagai alat justifikasi politiknya? Bagi peneliti, mereka ingin membangun sebuah hegemoni kuat dalam rangka menggiring pemilih larut dalam keinginannya. Dengan demikian, mereka (pemilih) dengan mudah dikontrol termasuk pilihan politiknya. Hegemoni dalam hal ini lebih mengarah pada 'manipulasi' kepercayaan massa yang dilakukan melalui media

persuasi yang melibatkan semua aspek yang selama ini menjadi identitas fundamental pemilih, dalam hal ini agama. Dari sini kemudian melahirkan dominasi serta terkadang 'arogansi' elite yang dapat dilihat salah satunya setelah ajang pilkada usai.

Perilaku Pemilih: Relasi Simbol, Simpati, dan Loyalitas

Menyimak kembali uraian di atas, penulis selalu mempertanyakan: mengapa simbol agama digunakan dalam kampanye? Apakah agama mampu menarik simpati pemilih? Jawabannya bukan saja berpaku pada realitas bangsa yang mayoritas umat beragama, tetapi juga pada faktor psikologis publik yang nyaman ketika mendengar istilah, lambang, atau apapun yang terkait dengan agama. Pada kasus pemilihan umum yang terekam beberapa tahun dekade terakhir (khususnya pasca reformasi), agama dengan mudah dapat dijadikan bahan kampanye melalui atribut atau simbol yang menjadi ciri khas agama tertentu. Islam misalnya, dengan realitas penganut yang mayoritas, dengan mudah dapat ditemukan bagaimana simbol mulai dari lambang Ka'bah, bulan sabit, warna yang diidentikkan dengan Islam (hijau), dan sebagainya digunakan silih berganti dan dalam berbagai kondisi oleh para aktor yang berkepentingan.

Ada tiga model perilaku pemilih dalam kasus pemilu di Kebumen Jawa Tengah. *Pertama*, pemilih yang mendasarkan pilihannya pada 'agama'. Pemilih lebih condong memilih partai atau figur yang merepresentasikan agama Islam. Artinya, atas dasar kesamaan agama, maka pilihannya pun jatuh pada partai atau figur yang sama. Jadi, rasionalisasi pilihan terletak pada kesamaan ideologis (Islam). Islam menjadi alasan utama mengapa seseorang memilih partai atau calon yang ada. Pelaku atau pemilih seperti ini umumnya yang memiliki latarbelakang pengetahuan yang menganggap bahwa hanya melalui Islam, keresejahteraan, kesuksesan, dan kedamaian serta keberkahan dapat dirasakan. Khilafah Islamiyah pun kemudian sering menjadi jargon perjuangan.

Apa yang dikemukakan oleh Arini, menegaskan argumentasi di atas. Menurutnya, "... kalau ada yang mumpuni/ahli dalam bidang tertentu

(cerdas) orang Islam dan Non Muslim, maka yang saya pilih Muslim-Muslim". Artinya, persoalan kompetensi sesungguhnya persoalan lain jika dikaitkan dengan keyakinan pasangan calon. Demikian pula Rakhman Khakim (33) seorang guru di Kebumen menjatuhkan pilihannya jika sekiranya pasangan calon pemimpin terdiri atas beberapa calon berdasarkan agama, meskipun dengan catatan. Menurut Khakim,

"... saya secara subjektif memilih p[emimpin atau pasangan Muslim-Muslim. Karena itulah yang paling ideal, dengan catatan bahwa pasangan tersebut harus dipastikan sikap/sifatnya, tentang ketaatannya dalam agama" (Wawancara, RK [33], tokoh Pemuda, Kebumen, 12 Januari 2017).

Bagi informan, kesamaan agama masih menjadi faktor utama pilihan terhadap pemimpin yang ada. Dengan demikian, Islam sangat penting dan tidak saja menjadi identitas ideologis, tetapi juga menjadi 'magnet' bagi seseorang menentukan pilihannya.

Hanya saja, ada persoalan yang dihadapi terkait dengan pilihan seperti ini, yaitu tidak semua umat memiliki pandangan yang sama mengenai khilafah islamiyah itu sendiri. Banyak kalangan mengatakan bahwa sistem khilafah tidak cocok dengan kondisi Indonesia yang ada saat ini. Sistem demokrasi yang telah teruji dan berhasil menyatukan serta membangun bangsa ini. Di sini ada pertentangan antara khilafah dan demokrasi. Artinya, selalu ada dua kutub yang saling berlawanan dalam menentukan pilihan. Boleh jadi perbedaan seperti ini terjadi akibat perbedaan latarbelakang pemahaman keagamaan, afiliasi politik, afiliasi organisasi masyarakat, dan perbedaan-perbedaan lain seperti latarbelakang pendidikan.

Kedua, pilihan yang didasarkan pada pertimbangan kesamaan etnis. Seseorang memilih bukan lagi berdasarkan pada pertimbangan kesamaan ideologis (agama), tetapi lebih pada kesamaan etnis atau suku. Di sini yang muncul adalah dorongan untuk menonjolkan jati diri melalui jalur penguatan identitas etnis. Identitas

etnis umumnya menguat seiring dengan adanya kontestasi di antara etnis yang bertarung dalam pilkada dan semacamnya. Ada kecenderungan isu etnis dihembuskan dalam rangka meraih suara pemilih yang beretnis sana dan sekaligus menguji soliditas etnis yang bersangkutan. Isu etnisitas ini selalu mengemuka karena pada prinsipnya setiap etnis juga memiliki klaim yang mengungguli etnis-etnis yang lain. Peluang inilah kiranya yang digunakan oleh elite partai atau politisi dalam meraih kesuksesan dan pengaruh dalam politik, khususnya pada perhelatan pilkada.

Ketiga, ada pemilih yang mendasarkan pilihannya atas dasar rasionalitas murni yang berbasis pada pemenuhan kebutuhannya kelak jika yang dipilih menjadi pemenang. Tipe ini tidak lagi terkait secara jelas dengan agama dan etnis. Mereka betul-betul keluar dari faktor kesamaan dan hubungan primordial seperti yang diuraikan di atas. Mereka lebih rasional dan memilih berdasarkan pertimbangan untung-rugi. Memperhatikan visi dan misi para calon merupakan salah satu indikator seseorang pada tipe ini menentukan pilihannya. Oleh karena itu, pemilih yang semakin cerdas akan menjatuhkan pilihannya pada pasangan atau calon yang memiliki visi dan misi serta program kerja yang jelas dan juga rasional.

Keempat, terdapat pula tipe pemilih yang lebih 'fleksibel' karena tidak mendasarkan pilihannya pada beberapa pola di atas. Mereka lebih cenderung berpikir sederhana, pragmatis, bahkan lebih dekat pada oportunisme. Hal ini sangat dipengaruhi oleh pengetahuan tentang politik itu sendiri, dan kondisi di mana ia berada saat itu. Artinya, pilihannya didasarkan pada urusan yang bersifat jangka pendek dan individualistis sehingga cenderung mengorbankan kepentingan politik yang lebih substantif.

Kondisi di atas, bagi peneliti, membuka peluang mengentalkan hubungan antara agama dan kekuasaan. Sebab, kekuasaan yang diperoleh lahir dari upaya yang melibatkan agama di dalamnya. Ini sejalan dengan penegasan Ignas Kleden bahwa tidak ideologi yang tidak mempunyai muatan kekuasaan (Hasan, 2014: 304). Dalam kondisi demikian, baik agama maupun kekuasaan dapat saling

mengakomodasi, sekaligus selang berkontestasi tergantung pada tingkat kepentingan masing-masing. Fungsi sosial agama, dalam hal ini menjadi penentu semakin kuatnya integrasi di kalangan pemeluknya, sehingga konflik saling dihindari.

PENUTUP

Dari uraian di atas terlihat adanya dilema bagi elite partai politik (khususnya Partai Politik Islam). Keinginan untuk terlibat aktif dalam politik, tetapi tidak berbanding lurus dengan posisinya yang hampir selamanya tidak pernah menguntungkan. Dari pemilu ke pemilu sejak Orde Lama, partai politik Islam sesungguhnya pernah menang, tetapi tetap saja tidak mampu memanfaatkan kemenangan itu. Partai Islam yang menjadi pemenang tidak mampu menjadi 'penguasa' dan mengendalikan 'kekuasaan'. Di era Orde Baru, partai politik Islam pun 'dibabat' habis oleh Suharto sehingga hanya PPP yang hadir melengkapi keberadaan dan kemenangan Golkar kala itu.

Di era Reformasi pun demikian, partai politik Islam selalu menjadi 'pelengkap'. Bahkan, partai politik (termasuk memilih agama sebagai azasnya) bermunculan dan gugur dalam setiap pemilu. Intinya, partai politik Islam tidak pernah menang. Ini memunculkan sebuah pertanyaan: mengapa partai politik Islam selalu kalah, sedangkan jumlah umat Islam di Indonesia mencapai 87 %? Apakah partainya yang bermasalah ataukah pemilihnya? Inilah sederatan pertanyaan yang sesungguhnya muncul di tengah dominasi umat Muslim di Indonesia. Ada kekhawatiran mengenai kondisi tersebut ketika partai politik Islam dianggap gagal melakukan 'pemahaman' politik terhadap umat sehingga partai politik Islam pun bukan menjadi pilihan utama pemilih Muslim.

Penggunaan agama dan aktivitas politik tidak lepas dari realitas pemilih di Indonesia yang masih menempatkan agama pada posisi puncak siklus kehidupan sosialnya. Agama menjadi pusat atau rujukan utama yang berdampak pada penempatan agama yang tidak tergantikan, meskipun dimasukkan ke dalam ranah politik praktis. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa agama masih menjadi magnet bagi aktor politik di

Indonesia. Meskipun sesungguhnya, dalam beberapa kasus pemilihan bupati/wakil bupati,

walikota/wakil walikota, agama (Islam) tidak memberikan kontribusi signifikan, namun tetap saja agama digunakan sebagai salah satu media pendulang suara. Ini sekali lagi menegaskan bahwa kehidupan masyarakat Indonesia dalam segala lini

tidak bisa terlepas dari pengaruh agama.

Hanya saja, hal di atas juga bertentangan dengan beberapa kondisi berikut. *Pertama*, mengingat sikap kedewasaan dalam beragama dan berpolitik yang lebih mengedepankan substansi dan prestasi nyata, maka banyak pemilih tidak memilih berdasarkan kesamaan ideologis, tetapi lebih pada kalkulasi untung rugi (berdasarkan kepentingan). Mengingat ruang publik mesti bersifat inklusif sehingga tidak memicu segregasi sosial berdasarkan sentimen etnis dan agama yang pada urutannya akan memperlemah kohesi bangsa. *Kedua*, berdasarkan kalkulasi politik bahwa lembaga partai politik yang kental dengan jargon dan simbol agama ternyata selama ini semakin berkurang peminatnya, maka banyak elite politik mengubah metodenya meskipun hingga saat ini kecenderungan mengubah haluan masih pada tataran wacana. *Ketiga*, partai politik tidak perlu menonjolkan ciri keagamaan secara eksklusif mengingat negara Indonesia menganut falsafah dan ideologi Pancasila yang menempatkan ketuhanan pada sila pertama. Namun demikian, penggunaan simbol agama dalam berbagai Pilkada, khususnya di Kebumen, Jawa Tengah yang tidak lepas dari romantisme mengenai realitas pemilih yang dominan atau mayoritas Islam, membuktikan bahwa agama masih menjadi salah satu alat untuk mendulang suara dalam pemilihan di Indonesia.

Daftar Pustaka

- [1] Buck, Christopher. 1999. *Paradise and Paradigm: Key Symbols in Persian Christianity and the Baha'i Faith*. New York: State University of New York.
- [2] Evans, Malcolm D. 2009. *Manual on the Wearing of Religious Symbols in Public Areas*. Council of Europe France Publishing.

- [3] Geertz, Clifford. "Religion as a Cultural System," in *Anthropological Approaches to the Study of Religion*, ed. M. Banton (London: Tavistock, 1966): 1-46
- [4] Hasan, Noorhaidi "Between the Global and the Local: Negotiating Islam and Democracy in Provincial Indonesia." in Gerry Klinken and Ward Berenschot (eds). 2014. *In search of Middle Indonesia: Middle Classes in Provincial Towns*. Leiden, Boston: Brill
- [5] _____. 2014. "Agama dan Kekuasaan Politik Negara", dalam *Jurnal Karsa Vol 22 Nomor 2 Desember*. Pamekasan: STAIN Pamekasan.
- [6] Hasse J. 2016. "Dinamika Hubungan Islam dan Agama Lokal di Indonesia: Pengalaman Towani Tolotang di Sulawesi Selatan", dalam *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya, Vol 1, No. 2*. Hal. 179-186.
- [7] Qodir, Zuly. 2015. *Gerakan Islam Non Mainstream dan kebangkitan Islam Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [8] R.J. Vatikiotis, Michael. 1994. *Indonesian Politics under Suharto: Order, Development, and Pressure for Change*. London & New York: Routledge.
- [9] Turner, Bryan S. (ed.) 2010. *The New Blackwell Companion to Sociology of Religion*. Oxford: Blackwell Publishing.
- [10] www.ppid.kebumenkab.go.id
- [11] www.pilkada2015.kpu.go.id/kebumenkab
- [12] www.fuad-yazid-kebumen.blogspot.co.id
- [13] www.kebumenekspres.com
- [14] www.kebumenkab.bps.go.id
- [15] www.sangpencerah.id

